

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat di tingkat Kelurahan tidak lepas dari tugas Lurah. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan Lurah yang kompoten sehingga dapat memenuhi tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.¹

Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang dipilih langsung oleh Bupati atau Wali Kota. Fungsi dan tugas Lurah adalah menyelenggarakan fungsinya yaitu melaksanakan kegiatan pemerintah kelurahan, pelaksanaan program, kegiatan pem berdayaan masyarakat, penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan, penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kelurahan, penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan, pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh

¹ Marsel R. Rondonuwu, *Kinerja Lurah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Suatu Studi di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado)*, <http://media.neliti.com/media/publication/160874-ID-kinerja-lurah-dalam-meningkatkan-kesejah.pdf>.

atasan atau pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, peran pemerintah Kelurahan dapat dioperasionalkan dengan indikator Pembinaan masyarakat, mengayomi dan pelayanan masyarakat.²

Peran pemimpin di daerah khususnya Lurah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perubahan dan motivasi kerja kepada bawahannya, sehingga dapat meningkatkan semangat kerja serta disiplin kerja secara lebih efektif, seorang lurah harus menjadi teladan kepada bawahannya dan menjadi contoh, serta memberikan motivasi kerja kepada bawahannya. Peran dari seorang Lurah di harapkan menjadi contoh terhadap bawahannya dan mampu membawa perubahan dalam perilaku diri sendiri kemudian beranjak keluar untuk melayani masyarakatnya.³ Lurah juga berperan membawa perubahan pada pembangunan fisik di Kelurahan Buangin.

Pembangunan fisik merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Berbagai upaya dan program-program untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah. Hubungan pembangunan nasional

² Daniel Filterianto Robial, *Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik*, Artikel, hlm. 7-8

³ Nunut Natalina Sitiinjak, *Peranan Lurah Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kantor Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur*, skripsi, 2022.

dengan pembangunan daerah yaitu adanya hubungan yang bersifat subordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur perencanaan pembangunan daerahnya secara mandiri. Namun perencanaan pembangunan yang disusun secara mandiri harus perpedoman pada perencanaan pembangunan yang telah disusun pemerintah pusat.⁴

Pembangunan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan merupakan realisasi pembangunan nasional untuk menunjang pembangunan di tingkat kelurahan, sebagai peran pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Sasaran pembangunan nasional dan pembangunan manusia mengandung makna bahwa tujuan akhir pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun non material.⁵

Pada pembangunan fisik di Kelurahan Buangin Kecamatan Rantebua selama ini hanya dikerjakan oleh perintis dan hanya beberapa meter saja yang dibeton pada bulan Juni sehingga pembangunan di Kelurahan Buangin tidak maksimal. Pada tahun 2022 ada juga pekerjaan jalan yang dilakukan oleh

⁴Andi Akhmad Muliawan, Dian Agung Wicaksono, *Relasi Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, <https://etd.repository.ugm.ac.id>.

⁵ Finken A. J Angkow, Joice Rares, Rully Mambo, Skripsi, *Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kelurahan Uwuran 1 Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan*, hlm. 2

swadaya masyarakat (Persekutuan Bokin Pitung Penanian). Pada tahun 2023 sudah ada tiga titik pengecoran jalan dengan panjang jalan 150 meter. Jadi hanya 450 meter jalan yang sudah dikerjakan. Dalam rencana pembangunan di Kelurahan Buangin masih dalam proses pembangunan jalan yang hanya menunggu arahan dari Bupati Toraja Utara. Adapun program kerja Kelurahan Buangin yang peneliti temukan yaitu pembentukan kelompok tani, kerja bakti atau jumat bersih, pembangunan fisik. Sejalan dengan itu adapun program kerja yang tidak terealisasi yaitu pembuatan dranase yang sudah dikerja tapi belum maksimal, pengecoran jalan, pasar belum ada bangunan permanen, dan lampu jalan yang belum terpasang.⁶

Pembangunan fisik Kelurahan Buangin Kecamatan Rantebua tentunya memiliki rencana, gambaran atau persiapan tersendiri untuk kedepannya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), rencana kegiatan pembangunan untuk jangka waktu 6 tahun. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) penjabaran dari RPJM untuk jangka waktu 1 tahun yang akan diusulkan pemerintah Kelurahan. Maka dari itu peningkatan pembangunan di Kelurahan adalah tanggung jawab Lurah bersama masyarakatnya sehingga pembangunan pedesaan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.⁷ Jadi apabila Lurah

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Lurah Buangin Tanggal 4 Oktober 2023.

⁷Budi Sunarso, Sosiologi Pembangunan Desa, (Uwais Inspirasi Indonesia,2023), h. 6 dan 118

melaksanakan tugasnya dengan baik akan kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kepemimpinan Lurah sebagai pemimpin dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kelurahan Buangin Kecamatan Rantebua?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: untuk menganalisis kepemimpinan Lurah sebagai pemimpin dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kelurahan Buangin Kecamatan Rantebua.

D. Manfaat Penelitian

Ada dua unsur yang menjadi manfaat penelitian dari tulisan ini diantaranya:

1. Manfaat Akademik

Dapat berguna untuk memberikan sumbangsi dalam bidang ilmu politik, pemerintahan, Ketatanegaraan dan bidang lain berkompeten yang

ada kaitannya dengan peran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kelurahan Buangin.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang membutuhkan serta menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pemerintahannya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dalam penyusunan laporan untuk mendapat gambaran secara garis besar dari bab demi bab. Dengan adanya sistematika penulisan ini para pembaca akan lebih mudah memahami isi dari laporan yang buat. Berikut sistematika penulisan yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini diuraikan gambaran umum yang tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada bagian ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penelitian terhadap permasalahan yang ada.

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bagian ini berisi tentang metode penelitian yang akan dilakukan yang membahas tentang jenis dan metode penelitian, tempat penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data dan teknis analisis data.

BAB IV : Pemaparan Hasil Penelitian Dan Analisis

Pada bagian ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menguraikan tentang penyajian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan, saran dan daftar pustaka.